

## UPAYA PEMBENTUKAN BUMDES MELALUI ANALISA SWOT DI DESA LENGKOSAMBI TIMUR KABUPATEN NGADA NTT

Yulius Laga<sup>1</sup>, Maria Endang Jamu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Flores, Indonesia

<sup>1</sup>[leonlaga27@gmail.com](mailto:leonlaga27@gmail.com), <sup>2</sup>[endangjamu2@gmail.com](mailto:endangjamu2@gmail.com)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Program Studi Manajemen Universitas Flores di desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngadaa, Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam menanggapi tantangan pembangunan, terutama dalam menjawab masalah di desa Lengkosambi tentang upaya untuk membentuk Badan Usaha milik desa. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan sebagai bentuk analisis potensi desa sehingga dapat digunakan sebagai bisnis desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). Hasil penelitian ini adalah penjelasan berdasarkan analisis SWOT dan pengembangan strategi yang dapat diterapkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa Lengkosambi Timur.

**Kata Kunci:** BUMDes, SWOT, Potensi Desa, Strategi Pengembangan

*Abstract: Community Service conducted by the University of Flores Management Study Program in November 2018 in East Lengkosambi village, Ngada Regency, East Nusa Tenggara as a form of collaboration between academics and the community in responding to development challenges, especially in answering problems in Lengkosambi village about the efforts to establish a village-owned Business Entity. SWOT analysis is conducted to see strengths and weaknesses as well as opportunities and challenges as a form of analysis of village potential so that it can be used as a village business through Village-Owned Enterprises (BUMDEs). The results of this study are explanations based on the SWOT analysis and the development of strategies that can be implemented to form village-owned enterprises (BUMDes) in supporting village community welfare and economic sustainability of the East Lengkosambi village community.*

**Keyword:** BUMDes, SWOT, Village Potential, Development Strategy

---

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pembangunan perekonomian desa dengan berbagai macam program, namun hasilnya belum cukup signifikan memberikan kontribusi sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018). Zulkarnaen (2016) berpendapat bahwa faktor yang paling dominan timbulnya hambatan pada program pembangunan ekonomi pedesaan adalah campur tangan pemerintah yang kemudian menghambat kreativitas dan daya inovasi masyarakat desa untuk mengembangkan roda perekonomian. Hal lainnya bahwa sistem dan mekanisme kelembagaan di wilayah pedesaan belum berjalan secara efektif sehingga timbul ketergantungan pada bantuan pemerintah. (Prasetyo, 2016) mendukung dengan pernyataan bahwa kondisi desa sebagai pemerintahan terkecil

memberikan implikasi strategis bagi pembangunan untuk skala nasional. Desa memiliki potensi yang pada umumnya terdapat sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan jumlah penduduk yang relatif banyak (Mahayana, 2013), namun kendala yang dihadapi oleh pedesaan adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan dihadapkan pada persoalan pengelolaan keuangan, sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan desa sering mengalami kendala salah satu solusi program kegiatan adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Zulkarnaen (2016) juga menambahkan bahwa eksistensi desa seharusnya mendapat perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. BUMDes merupakan suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat desa sehingga dampaknya secara langsung akan membantu masyarakat desa tersebut (Hayyuna, Pratiwi, & Mindarti, 2014).

Upaya pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami beberapa kendala berdasarkan hasil tinjauan lapangan diantaranya: keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam upaya membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), disisi lain belum terlaksananya rembuk bersama desa sebagai bentuk kesepahaman antara warga dan aparatur desa dalam mengembangkan potensi desa dan membentuk BUMDes sebagai bagian keputusan bersama masyarakat. Permasalahan lainnya yakni keterbatasan sumberdaya manusia dalam mengelola BUMDes yang dinilai terlalu beresiko dengan alasan pengelolaan dana yang cukup besar dan akses informasi seputar BUMDes masih terbatas, adanya perbedaan kepentingan politik, belum maksimalnya layanan oleh aparatur desa terhadap masyarakat dan aset desa yang belum termanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngada bersama Program Studi Manajemen, Universitas Flores menjadi penting bagi upaya pembentukan BUMDes, selain memberikan sosialisasi dan penyuluhan sehingga membentuk pemahaman sebagai upaya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat Desa Lengkosambi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdasarkan pada pengembangan potensi desa yang berkelanjutan.

Payung hukum pembentukan BUMDes berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ridlwani (2015)) menegaskan bahwa landasan hukum pembentukan BUMDes sangat kuat yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Berkaitan dengan hal ini pemerintah daerah juga memiliki kapasitas dalam membuat aturan yang mendukung pembentukan BUMDes dan secara langsung desa juga memiliki andil dalam membuat peraturan yang sesuai dengan keadaan dan

kekhasan desa. Tujuan pembentukan BUMDes sebagai pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Pertimbangan pendirian BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Sembiring (2017) menjelaskan sesuai pasal 5 ayat 1 mengenai syarat pembentukan BUMDes:

1. Merupakan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dankurang terakomodasi; dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat anasli desa.

Berdasarkan syrat pembentukan, selanjutnya merupakan pedoman pembentukan BUMDes merupakan hal pokok sehingga BUMDes dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagai pendukung peningkatan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan. Ridlwan (2014) menunjukkan beberapa hal penting yang dibutuhkan sebagai tahapan pendirian BUMDes adalah:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten; diatur berdasarkan Perdes; satu desa, hanya terdapat satu BUMDes;
2. Pemrintah kabupaten memfasilitasi pendirian BUMDes; BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR);
3. Pendirian BUMDes melaalui rembuk desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes; melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes; menyusun AD/ART; dan mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat Desa Lengkosambi Timur dalam upaya pembentukan BUMDes, maka beberapa tahap pelaksanaan kegiatan diantaranya penyuluhan atau sosialisasi pembentukan BUMDes bagi masyarakat dan perangkat desa, untuk dapat mengetahui permasalahan didesa, tinjauan potensi desa sebagai pondasi pembentukan usaha BUMDes yang berkelanjutan dan sekaligus merupakan langkah untuk melihat kondisi desa (kekuatan dan kelemaha) serta peluang dan ancaman bagi pembentukan BUMDES. Pada penelitian ini akan menghasilkan pemetaan dalam matrik SWOT (*Stength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang dapat menunjukkan strategi yang tepat untuk

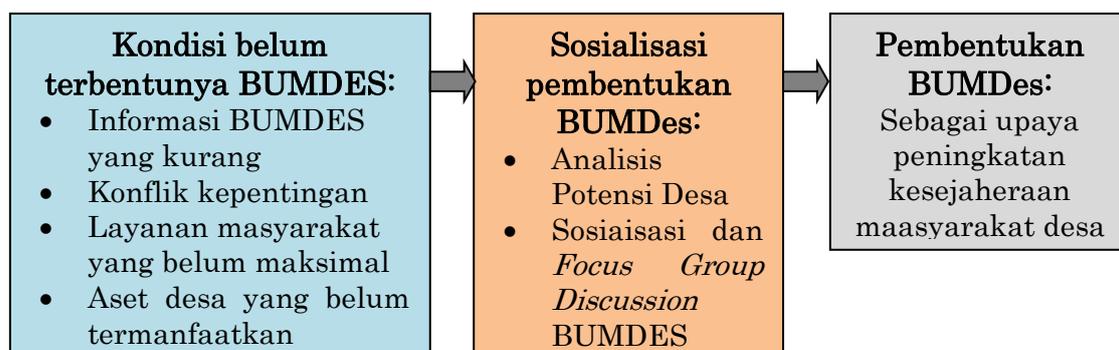
diimplementasikan oleh perangkat desa dalam upaya pembentukan BUMDes. Komponen dalam Analisa SWOT diantaranya:

1. Kekuatan (*Strength*): merupakan kondisi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Desa Lengkosambi Timur yang dapat berupa potensi desa sebagai sumber kekuatan sekaligus kekhasan sumber daya alam desa dalam menghadapi persaingan.
2. Kelemahan (*Weakness*): Merupakan kondisi yang dapat menjadi kelemahan bagi Desa Lengkosambi dan dapat menjadi kendala, terutama dalam upaya pembentukan BUMDes maupun kualitas sumber daya manusianya.
3. Peluang (*Opportunity*): Kondisi diluar Desa Lengkosambi Timur yang dapat memberikan peluang atau kesempatan dalam upaya pengembangan BUMDes dimasa yang akan datang.
4. Ancaman (*Threat*): Merupakan kondisi yang menjadi ancaman baik ditingkat internal maupun eksternal yang dapat menjadi penghalang pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode PAR memiliki tiga variabel yaitu, Partisipatoris, Action (aksi) dan Research (penelitian) menurut Inayah et al. (2018) urutan metodologi *Research, Action, and Participatory* (PAR) sebagai berikut:

1. Penelitian (*Research*) merupakan tahapan meneliti permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngada dengan melihat sebab dan akibat dari permasalahan tersebut, payung hukum pembentukan BUMDes, Tujuan, Kriteria dan Tahapan penting dalam pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur.
2. Aksi (*Action*) berdasarkan masalah yang teridentifikasi, tahap selanjutnya dengan mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur.
3. Partisipasi (*Participatory*) tahap berikutnya adalah melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat desa, pemerintah daerah, dan perangkat desa dalam menindaklanjuti solusi alternatif secara bersama-sama.

Langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngada sesuai Gambar 1 berikut:



**Gambar 1.** Prosedur Pelaksanaan Pengabdian

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi bersama aparaturnya desa Lengkosambi Timur bersama masyarakat, terdapat beberapa fakta lapangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia: Desa Lengkosambi Timur masih memiliki keterbatasan dalam akses informasi pembentukan BUMDes, tata aturan (perundang-undangan) sebagai payung hukum pembentukan BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap upaya pembentukan BUMDes yang masih rendah, komponen masyarakat yang terlibat dalam pembentukan BUMDes belum memiliki keterampilan secara khusus yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.
2. Proses pendampingan: kondisi masyarakat di desa Lengkosambi Timur masih butuh dukungan dan pendampingan baik dari pemerintah daerah dan akademisi untuk mengoptimalkan pembentukan BUMDes dan membantu dalam menganalisis potensi desa yang dapat dikembangkan pada perekonomian yang berkelanjutan di Desa Lengkosambi Timur.

**Tabel 1. Matrik SWOT Pembentukan BUMDes  
Desa Lengkosambi Timur**

Matrik SWOT	Desa Lengkosambi Timur	
	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
	Ketersediaan alokasi dana desa Adanya payung hukum BUMDes	Orientasi pelaksana Desa (Kepentingan Politik)
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>(St 1,2 - Op 1,2)</b>	<b>(St 1,2 – Th)</b>
Memiliki keunggulan produk (asam) Lokasi strategis (akses jalan mudah)	Mengembangkan keunggulan produk Membentuk BUMDes	Komitmen bersama masyarakat desa Peningkatan sarana penunjang
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>	<b>(We 1,2 – Op 1,2)</b>	<b>(W1,2 – Th)</b>
Motivasi masyarakat desa kurang Keterampilan dan wawasan mengelolah	Peningkatan motivasi Pendidikan dan pelatihan	Pendampingan Pemerintah daerah Keterlibatan Akademisi

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembentukan BUMDes Lengkosambi, selanjutnya dalam bentuk persilangan/matrik untuk menentukan strategi yang tepat bagi upaya pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur. Strategi yang dapat dilaksanakan, dalam bentuk kegiatan diantaranya:

1. Menganalisis kapasitas produk unggulan desa yang berkelanjutan;
2. Berpartisipasi dengan desa sekitarnya yang telah membentuk BUMDes;
3. Ikut ambil bagian bersama Pemerintah Daerah dalam upaya membangun BUMDes;
4. Melakukan *update* (pembaharuan) informasi seputar BUMDes;
5. Peningkatan Sarana dan Fasilitas penunjang BUMDes;
6. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai dengan keunggulan produk desa;

7. Melaksanakan dan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan seperti: Laporan Keuangan, dan Tata kelola BUMDes;



**Gambar 1-4.** Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi bersama Masyarakat Lengkosambi Timur

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan BUMDes berdasarkan potensi dan kekhasan desa merupakan aspek penting dalam menunjang kemandirian perekonomian desa. Kerja sama desa khususnya antar BUMDes memberikan kontribusi bagi penciptaan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Bagi pemerintah desa Lengkosambi Timur untuk segera merealisasikan pembentukan BUMDes sehingga potensi dan asset desa dapat dikelola secara maksimal dan menciptakan kemakmuran bagi perekonomian desa. Kontribusi pemerintah daerah (Kabupaten Ngada) perlu didukung dengan kebijakan dan aturan sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan dan adanya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa Lengkosambi Timur dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa, dengan dasar pertimbangan kebijakan yang efektif dilaksanakan pada ruang lingkup desa dengan legalitas hukum lembaga BUMDes akan memberikan kontribusi bagi masyarakat desa dan kemajuan perekonomian desa.

Saran bagi upaya pembentukan BUMDes di Desa Lengkosambi Timur, yakni (1) Pembentukan BUMDes berdasarkan potensi dan kekhasan desa merupakan aspek penting dalam menunjang kemandirian perekonomian desa. Kerja sama desa khususnya antar BUMDes memberikan kontribusi bagi penciptaan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Bagi pemerintah desa Lengkosambi Timur untuk segera merealisasikan pembentukannya; (2) Berdasarkan hasil kajian pentingnya pembentukan BUMDes sebagai usaha mandiri desa, oleh karena itu, realisasi pembentukan BUMDes dengan

panduan peraturan perundang-undangan perlu ditindaklanjuti ditingkat kabupaten/kota berupa perda dan ditingkat desa berupa peraturan desa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu: (1) Dr. Simon Sira Paji, M.A. Selaku Rektor Universitas Flores, Ibu Falentina Lucia Banda, S.E., M. Sc. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Lambertus Langga, S.E., M. Sc. Ketua Program Studi Manajemen, (2) Kepala Lengkosambi Timur, staf dan jajarannya serta masyarakat setempat atas perhatian dan kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini, (3) Tim dosen dan mahasiswa/I yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara khusus bagi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Flores dan Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses.

### DAFTAR RUJUKAN

- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., & Mindarti, L. I. (2014). Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–5.
- Inayah, N., Hadiono, A. F., Ekaningsih, L. A. F., & Aimah, S. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelestarian Makanan Tradisional Krupuk Kluntung Di Desa Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 180-191.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1, 400–414.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 10(1), 86-100.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Ridlwan, Z. (2015). Payung hukum pembentukan BUMDes. *Fiat Justisia*, 7(3).
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 39*(Nomor 1), Hal. 16-32.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).